



**PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
KEMEROSOTAN PARTAI POLITIK**

***STRENGTHENING SOCIETY PARTICIPATION AND
POLITICAL PARTY DESTRUCTION***

Efriza

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

efriza.riza@gmail.com

ABSTRAK

Awal runtuhnya Orde Baru, diikuti menjamurnya partai politik ditengarai akibat euforia pembelengguan politik yang terjadi semasa rezim itu berkuasa. Hingga sekarang, kebangkitan partai politik masih menonjol, malahan kita terjebak oleh perangkap *partycracy* (kedaulatan di tangan partai) ketimbang *democracy* (kedaulatan di tangan rakyat). Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang tiga hal, yakni partisipasi masyarakat, persepsi publik, dan demokrasi. Demokrasi di Indonesia paskareformasi menunjukkan upaya meningkatkan partisipasi publik, namun celakanya partai politik sekaligus lembaga DPR yang dianggap sebagai bagian pilar demokrasi malah tidak dipercayai oleh publik. Penelitian ini dirancang lewat pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik atau politisi merosot tajam. Sesuatu yang ironis sekaligus paradoks, ternyata, paskareformasi, partai politik ditengarai sebagai penyebab dari kemerosotan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Persepsi Publik, Partai Politik, dan Demokrasi

ABSTRACT

The beginning of the collapse of the New Order, found the proliferation of political parties suspected due to political euphoria that occurred during the regime's rule. Until now, the rise of political parties is still prominent, even we are trapped by the party cracy (sovereignty in the hands of the party) luxury democracy (sovereignty in the hands of the people). This research describes three things, namely community participation, public perception, and democracy. Democracy in post-reform Indonesia shows increased public participation, but unfortunately political parties as well as parliamentary institutions are considered as part of undemocratic democracy by the public. This study was designed through a qualitative approach using literature studies that found that the public against political actors or politicians declined sharply. Something ironic as well as the paradox, it turns out, post-reformation, political parties that are suspected to be the cause of the decline of democracy in Indonesia.

Keywords: Political Participation, Public Perception, Political Parties, and Democracy






PENDAHULUAN

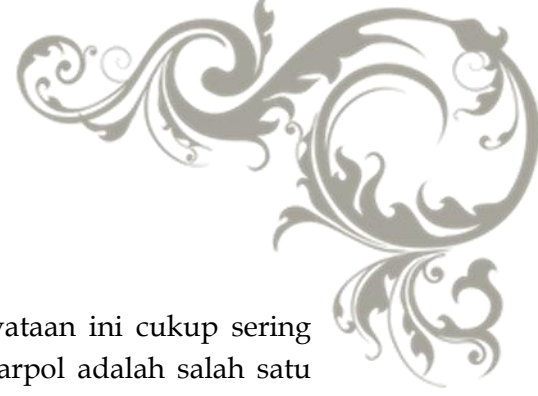
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, selain itu, lanskap politik dari sebuah negara demokratis adalah partai politik (parpol) dan pemilihan umum (pemilu). Keberadaan parpol semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah; menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik dan pemimpinnya. Akan tetapi, parpol dibuat tidak hanya untuk memerintah. Parpol juga untuk menyalurkan *collective will* untuk merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat (Antonio Pradjasto, 2007: 26).

Awal runtuhnya Orde Baru, diikuti menjamurnya parpol ditengarai akibat euforia pembelengguan politik yang terjadi semasa rezim itu berkuasa. Hingga sekarang, kebangkitan parpol masih menonjol, malahan kita terjebak oleh perangkat *party cracy* (kedaulatan di tangan partai) ketimbang demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). *Party cracy* memungkinkan pengendalian atas minimal dua lembaga, yakni kepresidenan (termasuk kepala-kepala daerah) serta parlemen (nasional dan lokal). Kedua lembaga itu memiliki hak konstitusional, mulai dari regulasi sampai implementasi, termasuk perekrutan sumber daya manusia, (Koran Jakarta, 2014: 4).



Ironisnya, kebangkitan parpol di era reformasi malah menimbulkan paradoks. Di satu sisi, UUD 1945 yang merupakan konstitusi bangsa telah menyiratkan peran parpol sebagai institusi penentu keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sejatinya, di tangan parpol dan bukan institusi lain, siapa-siapa saja yang akan mengendalikan bangsa ini ditentukan. Namun di sisi lain, parpol kerap menjadi sebuah institusi yang dicurigai dan bahkan dijauhi. Perkembangan dewasa ini mengarah pada situasi ketika sebuah institusi penentu, parpol nampak menjelma sebagai lembaga yang makin tidak dipercayai oleh publik (Firman Noor, 2015: 3). Di tengah merosotnya parpol, sudah barang tentu kerap diikuti dengan penurunan pandangan masyarakat bahwa para wakil di lembaga-lembaga perwakilan politik itu sudah tidak cukup mampu menjalankan fungsinya (*deficiencies of representative politics*). Realitas ini tentu mengasumsikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik di dalam realitas demokrasi tersebut, (Kacung Marijan, 2012: 113), sehingga menimbulkan tanya; bagaimana peningkatan partisipasi politik masyarakat di tengah kemerosotan partai politik?

Penelitian ini dirancang lewat pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) (M. Nazir, 2003).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik Antara Ideal Dan Kenyataan

Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. Ini didasari oleh fakta bahwa institusi parpol adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas, (Syamsuddin Haris, 2014: 45). Meski begitu pentingnya kedudukan parpol dalam sistem demokrasi, akan tetapi, tanpa parpol yang kuat, maka, tidak akan ada demokrasi yang kuat, (Sebastian Salang, 2007: v).


Pada awalnya, parpol dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang memunyai visi dan misi yang sama, sehingga, pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa parpol merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk program yang akan dilaksanakannya dengan cara konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, (Miriam Budiardjo, 2004: 404).

Penafsiran di atas jelas mencerminkan bahwa faktor ideologi tak bisa diabaikan, sebab, parpol mesti memiliki ideologi yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas pemersatu (Ramlan Surbakti, 1999: 115), akan tetapi, juga memberikan karakter tersendiri yang dapat menjelaskan mengapa suatu partai harus ada, adanya perbedaan karakter antar partai-partai politik, serta ideologi yang merupakan tujuan perjuangan partai. Di banyak sistem demokrasi, keberadaan ideologi tersebut diturunkan dalam manifesto dan program partai yang sudah barang tentu berbeda dengan partai lainnya. Perbedaan program kerja partai ini memudahkan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Atau program kerja mana yang sesuai dengan keadaan hidup masyarakat, tentunya, program kerja partai akan menjadi sikap dasar di dalam proses pengelolaan kebijakan negara, (Pramono Anung Wibowo: 2013: 272-273).

Konsep di atas telah menunjukkan, betapa pentingnya parpol sebagai suatu sarana bagi manusia atau warga negara untuk membentuk suatu organisasi dalam mewujudkan aspirasinya dan kemudian diwujudkan dengan fungsi-fungsi politik itu sendiri. Secara umum, fungsi parpol dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi utama; yakni artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen. Sebagaimana kita ketahui, antara fungsi yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan memiliki pengaruh besar terhadap ekspektasi dan animo anggota maupun masyarakat umum terhadap suatu parpol, (Sebastian Salang, 2007: 8).


Selama 19 tahun Reformasi yang telah kita lalui, pendirian parpol masih tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Partai-partai yang memasuki arena Pemilu 2004 sebanyak 24 partai politik terlihat lebih sedikit jika dibandingkan





dengan Pemilu 1999 yang berjumlah sebesar 48 partai politik, sementara, Pemilu 2009 diikuti 38 partai politik nasional atau lebih banyak jika dibanding Pemilu 2004, sedang Pemilu 2014 dikuti oleh 12 partai politik nasional atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 mendatang, yakni sebanyak 15 partai politik nasional.

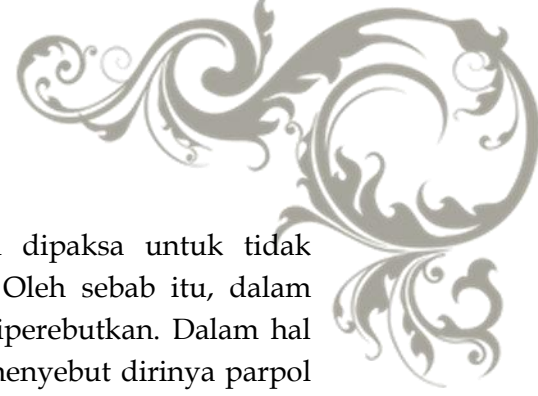
Melihat realitasnya, dalam pemilu-pemilu yang telah berlangsung, partai-partai baru akan terus berdatangan dan dapat memasuki arena pemilu karena belum terlembaganya proses penyelesaian konflik internal di dalam partai. Dalam banyak kasus, memasuki Pemilu 2019 mendatang, partai-partai baru tidak didirikan oleh para elite politik baru. Melainkan oleh para elite politik lama. Sebut saja Partai Berkarya yang merupakan fusi dua partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik, kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari sosok Tommy Soeharto yang pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar lewat Musyawarah Nasional (Munas) 2009 dan gagal. Kekecewaan karena tersingkir di dalam arena konflik khususnya dalam perebutan kepemimpinan partai, maka, mereka berusaha membentuk partai-partai baru. Partai-partai baru itu dibaratkan seperti *'old wine in new bootle,'* (Kacung Marijan, 2012: 66).



Melihat realitas di atas dan ditambah fakta setelah Pemilu 2004 yang menunjukkan bahwa partai-partai baru dapat memperoleh kursi di lembaga DPR, maka, memasuki Pemilu 2009, tampak adanya kecemasan dari partai-partai di Indonesia. Perlahan tetapi pasti, partai-partai mulai mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih, seperti PKS dan PDS yang menyatakan tidak lagi menjadi partai eksklusif. Pembentukan dan pemeliharaan konstituen tampaknya tidak lagi menjadi agenda kerja partai. Begitu pula dalam menjalankan fungsinya, sebagian partai baru tampak terlihat gregetnya saat tibanya pemilu. Merawat konstituen dengan berbasis program jangka panjang, kini, tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini karena kebutuhan politik jangka pendek berupa pendulangan suara terasa lebih mendesak, sehingga partai-partai lebih menempuh langkah-langkah instan. Tidak terkecuali sikap tak acuh untuk membuat pola rekrutmen internal partai yang baik, malahan perilaku partai-partai itu sendiri yang lebih memilih menempuh jalan pintas dengan melakukan rekrutmen anggota yang dilakukan secara transaksional dan tertutup, (Saifullah Ma'shum, 2012: 3).

Akibat dari perilaku politisi dan parpol dalam rangkaian pemilihan umum legislatif (pileg), maka, pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) --- justru mengkonfirmasi terbangunnya watak "partai mengambang" (*floating party*), atau perwujudan parpol tumbuh dengan kaki lemah bahkan tidak berkaki di masyarakat, (Kompas, 2006: 42).

Jika di masa Orde Baru kita berhadapan dengan gejala "massa mengambang" (*floating mass*), kini, yang dihadapi adalah masyarakat pemilih yang berkaki lemah atau malah tidak berkaki. Karena gerak parpol dibatasi hingga tidak bisa menjangkau basis pemerintahan terendah tempat sejatinya



para pemilih beraktivitas, sehingga, masyarakat pun dipaksa untuk tidak beraktivitas di dalam dan berasosiasi dengan parpol. Oleh sebab itu, dalam “pemilu,” mereka menjadi massa mengambang yang diperebutkan. Dalam hal ini, Golkar yang merengguk keuntungan karena tidak menyebut dirinya parpol sehingga memiliki ruang gerak yang luasa untuk menggalang calon pemilih.

Masa itu telah lama berlalu dan menjadi sejarah hitam politik semata. Demokratisasi semestinya menguatkan kembali kaki masyarakat dan mendorong kompetisi antarpol di atas lahan baru yang serba terbuka. Celaknya, yang kemudian tumbuh dari lahan baru ini adalah “partai mengambang,” bahkan efektivitas parpol cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituennya, setidaknya empat perilaku buruk parpol secara institusi tampak mudah dicermati.

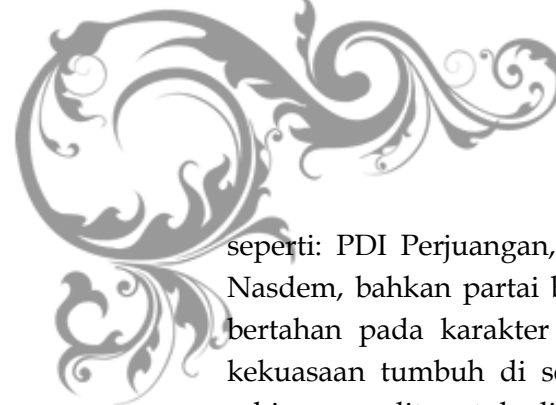
Pertama, nir-ideologi. Partai mengambang tidak punya ideologi, kecuali pragmatisme. Sepanjang masa Orde Baru, ideologi memang diberangus. Sepeninggal Soeharto, ideologi-ideologi tidak serta-merta bertumbuhan. Faktanya, hanya pragmatisme yang ternyata tersisa dari setiap puing ideologi lama. Pembumihangusan ideologi menyisakan pragmatisme sebagai kerak, abu atau ampasnya.

Bendera-bendera ideologi atau aliran memang dikibarkan, akan tetapi, sejatinya hanya menggarisbawahi keseragaman pemihakan pada pragmatisme itu. Umumnya partai era reformasi pun nyaris seragam, bahkan partai-partai memilih untuk berusaha seragam. Gejala ini mulai terlihat sejak Pemilu 2009 lalu, bahwa partai-partai berbasis agama akhirnya merelakan diri dan mendeklarasikan dirinya menjadi partai terbuka untuk rumah berbagai golongan yang ada di masyarakat ini. Mereka akhirnya mengambang, karena tidak berkaki di tengah kemajemukan masyarakat kita.

Kedua, nir-identitas. Partai-partai kita, nyaris tanpa kecuali, tidak punya ketegasan orientasi politik dan program. Sesungguhnya, ini terjadi sejak 1999 hingga sekarang. Semua parpol berusaha mengurus semua hal dan menjangkau semua dimensi persoalan. Mereka tidak tertarik untuk mempertajam orientasi politik dan programnya ke sektor, persoalan, atau isu spesifik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensinya, secara fisik kita punya banyak partai, namun, sulit untuk membedakan identitas politik yang satu dengan lain. Akibatnya, semua partai yang nir-identitas ini pun nyaris gagal dalam mewakili keragaman aspirasi masyarakat pemilih. Mereka mengambang karena menyikapi berbagai isu tanpa platform.


Ketiga, tipe personalistik dan cenderung oligarkis. Saat ini, tipe kepartaian di Indonesia hanya terbagi menjadi dua; yakni tipe programmatik dan tipe personalistik. Tipe programmatik yang menitikberatkan pada aktivitas program-program yang dibawa oleh para kandidatnya adalah PPP, PKS, dan Partai Golkar, sedang tipe personalistik adalah partai yang bertumpu pada patronase yang kuat dengan adanya pemimpin yang dianggap kharismatik,





seperti: PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Hanura, Partai Demokrat dan Partai Nasdem, bahkan partai baru; Partai Berkarya. Meski begitu, umumnya, parpol bertahan pada karakter kepemimpinan dan organisasi yang oligarkis. Pusat kekuasaan tumbuh di sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai, sehingga, sulit untuk diterapkannya sistem otonomi kepartaian. Kepentingan dan kenikmatan partai pun tidak terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama itu. Akhirnya, operasi partai terkendali di tangan segelintir pihak, hal ini merupakan sebuah realitas dari oligarkis partai.

Keempat, yang utama, nir-konstituen. Secara umum, partai-partai era reformasi masih dicirikan oleh kemiskinan kemauan dan kemampuan profesional mereka dalam membentuk serta memelihara konstituen. Sebagian besar partai mendekati masyarakat manakala mereka membutuhkan suara dukungan dalam pemilu. Parpol mendekat manakala membutuhkan pemilih dan serta-merta menjauh lalu lenyap setelah kebutuhannya sukses (atau gagal) terpenuhi.

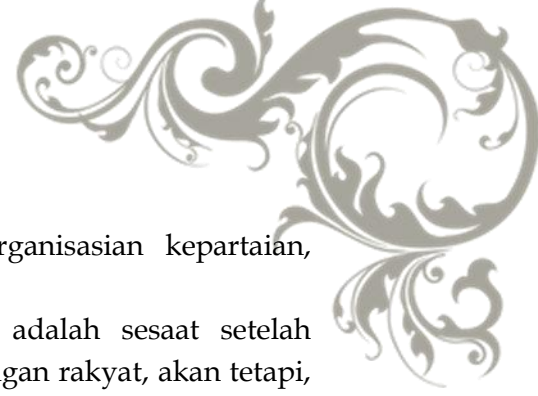


Sejatinya, reformasi memberi peluang bagi parpol untuk melakukan penggalangan dan pemeliharaan konstituen. Namun, pada realitasnya, satu contoh kecil, konstituen yang merupakan anggota partai karakter keanggotannya malahan menggantung ke atas. Artinya, di dalam internal partai, anggota lebih banyak ditentukan dari atas. Akibatnya, dukungan konstituen terhadap parpol setiap saat dapat berubah tergantung kepentingan sesaat konstituen, serta isu aktual yang berkembang di publik dan pemahaman konstituen terhadap situasi aktual partai, (Kompas, 2006: 42-43).

Sayangnya, di tengah ruang manuver yang leluasa, parpol masih menggunakan cara berpikir lama: berlibur manakala tak ada pemilu dan menjadi sibuk bukan kepalang tatkala pemilu mendekat. Hubungan partai dengan pemilu pun bersifat *ad hoc*, sementara, dan bubar selepas pemilu. Begitu juga hubungan dengan dukungan konstituen yang akhirnya bersifat labil. Situasi di atas berpengaruh terhadap perkembangan parpol, hal mana arah perkembangannya lebih banyak dipengaruhi dari faktor eksternal, seperti: media massa yang menguasai opini publik dan upaya *money* politik yang dianggap dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pragmatisme pemilih. Sementara, ideologi, program, kompetensi dan manajemen partai belum banyak berpengaruh terhadap arah kebijakan dan perkembangan partai, (Warsito Ellwin dan Hari Subagyo, 2011: xvii).

Kemerosotan Partai Politik dan Lembaga DPR

Sangat disayangkan di era reformasi ini jumlah parpol boleh bertambah, akan tetapi, tidak menunjukkan adanya korelasi kebebasan berpolitik dengan proses penyerapan aspirasi dan kepentingan masyarakat bahkan konstituennya. Di sini, kita malahan terjebak pada kebangkitan *party cracy* yang diibaratkan seperti buah busuk yang dipetik dari tanah kering dan berhama, akibat syahwat



kekuasaan dan kemiskinan kesadaran dalam pengorganisasian kepartaian, (Koran Jakarta, 2014: 4).


Titik awal terjadinya kemerosotan demokrasi adalah sesaat setelah disetujuinya rumusan kedaulatan rakyat yang ada di tangan rakyat, akan tetapi, dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Maksud dari rumusan hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa telah ditinggalkannya rumusan dasar supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi. Sayangnya, sejak itu, demokrasi yang semestinya bertumpu pada apa maunya rakyat bergeser menjadi apa maunya parpol. Dengan kata lain, pembentukan lembaga-lembaga negara sangat ditentukan oleh apa maunya partai melalui fraksi-fraksi di DPR, semisal, seleksi untuk anggota Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, penentu akhirnya adalah apa maunya DPR --- dalam hal ini parpol yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, kedaulatan rakyat pun menjadi kedaulatan partai, (Koran Tempo, 2017: 11).

Situasi sekarang ini bisa kita katakan bahwa negara sedang berada dalam masa demokrasi yang defisit (*deficit democracy*). Defisit demokrasi ini tumbuh sejak kepercayaan publik terhadap politisi maupun institusi politik menurun, tampak dari banyaknya partai dan wakil rakyat (*representative in democracy system*) yang kehilangan hubungan dengan yang diwakili (*represent*).



Harapan masyarakat di masa-masa awal runtuhnya Orde Baru, yakni agar parpol yang ada mampu membebaskan diri dari kebiru Orde Baru dan menjadi demokrasi yang mewakili kepentingan konstituen tampaknya tinggal angan-angan. Skeptisme masyarakat ini ditemukan dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) pada 2012 lalu. Survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat lebih besar 52,6 persen terhadap kinerja parpol selama ini dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang lebih sedikit sebesar 30,0 persen. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai tentu *linear* dengan ketidakpercayaan masyarakat bahwa parpol memperjuangkan kepentingan mereka, yaitu 51,4 persen, sedang yang memercayai hanya berjumlah 32,3 persen, (Skala Survei Indonesia, 2012). Celaknya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol malah semakin buruk. Hasil Survei Indobarometer mengkonfirmasi bahwa masifnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol juga berdampak terhadap tingkat kedekatan masyarakat kepada parpol. Sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai, (Koran Tempo, 2017: 7).


Efek dari ketidakpercayaan masyarakat sekaligus ketidakdekatan masyarakat dengan parpol, berdampak pula terhadap tidak percayanya masyarakat kepada lembaga DPR. Hasil Survei SSI menjelaskan realitas bahwa masyarakat menganggap anggota legislatif tidak mampu dalam melakukan tugasnya sebesar 45,3 persen, sedang yang menyatakan mampu 34,0 persen. Ketidakpercayaan masyarakat tentu diikuti ketidakpercayaan bahwa anggota



legislatif memperjuangkan kepentingannya sebesar 52,1 persen, sementara yang menyatakan peduli sebesar 28,5 persen, (Skala Survei Indonesia, 2012).

Mengkonfirmasi pembaruan hasil survei juga bisa kita pahami dari survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Agustus 2016; publik yang memercayai lembaga DPR hanya 53 persen, sedang 40 persen tidak percaya. Hasil survei ini juga turut menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap DPR dan Parpol ternyata berbanding terbalik dengan Presiden, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan KPK yang masing-masing berada di tiga besar paling dipercaya masyarakat. Bahkan, menurut Burhanuddin Muhtadi, bahwa tingkat kepercayaan terhadap parpol dan DPR tidak pernah naik kelas sejak 2002 lalu, (Koran Tempo, 2016: 9).

Hingga sekarang, ternyata, kinerja DPR juga belum menunjukkan sesuai harapan publik yang diwakilinya. Penilaian ini terlihat dari integritas mereka dalam menyuarakan aspirasi rakyat lewat kinerjanya. Mayoritas publik berdasarkan jajak pendapat “Kompas” 2017 menyatakan; masyarakat masih menganggap hasil kerja DPR tidak memuaskan dan buruk pula citranya dengan prosentase sebesar 71,3 persen. Misalnya terhadap kinerja legislasi, 75,4 persen menyatakan tidak puas dengan DPR, sementara ketidakpuasan masyarakat atas peran DPR dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah sebesar 66,9 persen, sedang ketidakpuasan masyarakat atas peran DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sebesar 74,9 persen, (Kompas, 2017: 5).



Saat ini, perkembangan defisit demokrasi di Indonesia malahan dapat dikatakan sedang mengalami problematika kronis, karena dua prasyarat demokrasi mengalami kemunduran. Jika sebelumnya DPR kembali menjadi sorotan berdasarkan hasil survei *Transparency International Indonesia* (TII) yang menyatakan DPR pada 2017 masih menjadi lembaga pemerintahan yang paling tinggi tingkat korupsinya, 54 persen, dengan terungkapnya kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (KTP-el) yang diduga menyeret sebagian besar anggota DPR periode 2009-2014 dan pejabat negara lainnya. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Survei ini juga semakin menegaskan jika lembaga DPR di era reformasi ini belum mengalami perubahan persepsi sebagai institusi terkorup di negeri ini, bahkan penelitian TII tersebut semakin meningkatkan citra buruk DPR seperti sesuai dengan surveinya pada 2013 dan 2005 lalu yang menempatkan DPR sebagai institusi terkorup kedua di negeri ini, (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/08/omgr7y280-survei-tii-dpr-lembaga-terkorup>).

Meski berbau oligarkis, problematika korupsi juga masih terjadi terus-menerus dalam proses pencalonan Pilkada. Kenyataan ini selaras dengan idiom yang khas melekat dalam penentuan calon kepala daerah bahwa “tidak ada makan siang yang gratis,” berdampak pada Pilkada serentak 2018 ini. Sehingga KPK mensinyalir bahwa 90 persen kepala daerah peserta Pilkada 2018 terindikasi terlibat kasus korupsi bahkan ada yang berstatus petahana,



(http://www.inews.id/multimedia/read/90-persen-peserta-pilkada-berpotensi-jadi-tersangka?sub_slug=video).

Merosotnya citra parpol itu, tentu akan berakibat buruk terhadap opini publik yang merupakan kekuatan politik penting dalam demokrasi. Opini publik yang buruk niscaya akan membuat citra demokrasi juga merosot. Namun kepercayaan publik yang menurun bukan pada demokrasi dalam tataran konsep, melainkan terhadap aktor politik atau politisi yang sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan parpol yang mengusungnya, (Anwar Arifin, 2006: 202-203). Kemerosotan parpol di era reformasi juga ditunjukkan oleh hasil kajian Lili Romli yang menunjukkan; di paskareformasi institusional parpol masih lemah karena faktor absennya ideologi partai, munculnya kepemimpinan personal/klientelistik, konflik internal partai, dan temuan baru, pragmatisme politik, (Lili Romli, 2017: 21).

Selaras dengan yang tersebut di atas, meski demikian, menurut Ingrid van Biezen, merosotnya citra parpol tidak berarti bahwa parpol itu tidak lagi relevan dalam kehidupan demokrasi sekarang ini, (Anwar Arifin, 2006: 202-203).

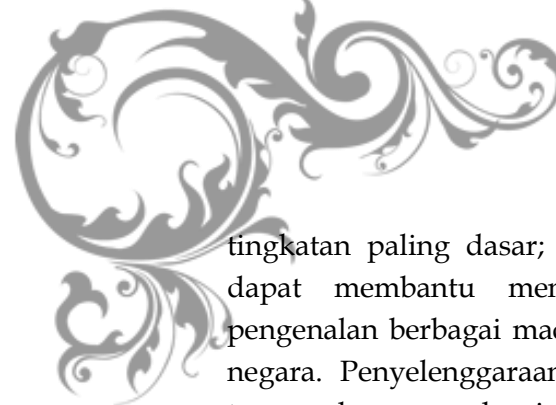
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sebagai pemberi mandat, semestinya, rakyat tidak hanya berhenti saat memberikan suara atau dukungan pada waktu pemilu saja. Di tengah melemahnya partai politik dan lembaga perwakilan rakyat, maka, kelompok kepentingan sebagai bagian dari infrastruktur politik perlu memainkan perannya yang lebih besar; seperti sumber informasi, melakukan pemantuan, dan penekanan dalam upaya membantu memengaruhi pengambilan keputusan yang memihak kepada masyarakat, maupun mendorong dalam rangka memberikan informasi-informasi bagi parpol dalam pemilihan calon-calon favorit untuk penentuan jabatan publik.

Adapun, peningkatan partisipasi masyarakat bisa dilakukan melalui peningkatan peran dari kelompok kepentingan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan yang tidak memperoleh respons negatif dibandingkan partai politik dan lembaga perwakilan, juga perlu mempertimbangkan partisipasi politik berupa keikutsertaan warga negara dan kelompok kepentingan dalam program-program pembangunan pemerintah sebagai upaya peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat. Dengan upaya perhatian yang besar dari penguasa politik terhadap tingkat partisipasi, maka, masukan dari masyarakat ini dapat dijadikan tolok ukur normatif bagi suatu sistem politik. Hal ini selaras dengan persepsi bahwa semakin berpengaruhnya partisipasi masyarakat dan turut sertanya kelompok kepentingan dalam proses pengambilan keputusan politik, maka, akan semakin demokratis sistem politiknya, (Maswadi Rauf, 1991: 8).

Membangun kesadaran peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan pemerintah, juga dapat dilakukan dalam





tingkatan paling dasar; yakni di lingkungan sekitarnya. Diharapkan, hal ini dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat seperti pengenalan berbagai macam informasi, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penyelenggaraan kegiatan di masyarakat, misalnya kegiatan karang taruna dan pramuka, juga dapat terus memupuk respons partisipasi politik masyarakat agar terus meningkat.

Paskareformasi, dengan merosotnya dan dari berbagai problematika yang mendera partai-partai serta lembaga perwakilan rakyat, maka, keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai program pembangunan pemerintah --- kesadaran dan kepedulian akan program pembangunan pemerintah, sudah barang tentu, perlu dilakukan dengan cara di mobilisasi agar dapat menumbuhkan pemikiran tentang perlunya keterlibatan secara sukarela atau dengan penuh kesadaran. Keberhasilan program pembangunan pemerintah, umpamanya dalam mensosialisasikan kebijakan melalui bimbingan masyarakat utamanya petani sebagai upaya meningkatkan partisipasi petani atas kebijakan tersebut, tentunya akan dapat menimbulkan keinginan dan kesadaran di kalangan para petani untuk dengan sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

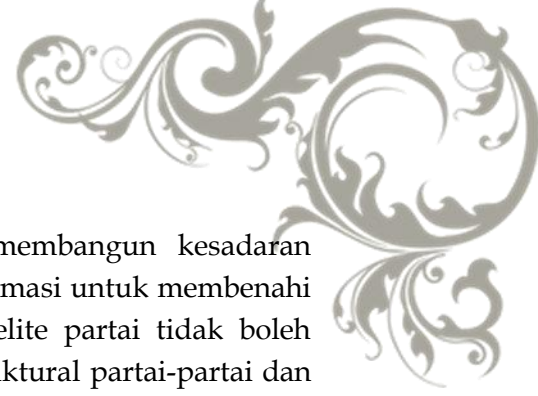


SIMPULAN

Paska reformasi belum memperlihatkan kemajuan, malahan cenderung mengarah pada defisit demokrasi yang disumbang oleh parpol yang juga berdampak terhadap lembaga DPR.

Meski begitu, fakta perlu diungkapkan bahwa perkembangan parpol sekarang ini kurang responsif terhadap konstituen disebabkan karena perlahan tetapi pasti mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka untuk meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih. Oleh sebab itu, pembentukan dan pemeliharaan konstituen tidak lagi menjadi agenda kerja partai. Akibat ikatan hubungan partai-partai terhadap pemilih atau konstituennya menjadi berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya dua hal, pertama, dari sisi para pemilih atau konstituen semakin *enggan* untuk mengidentifikasi diri dengan partai yang sama selama dalam suatu siklus pemilihan dan terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengubah identifikasi mereka dari pemilihan ke pemilihan. Kenyataan ini, tentunya menguntungkan partai-partai baru tidak hanya sebagai peserta pemilu semata, akan tetapi, kemungkinan besar dapat memperoleh kursi di DPR.

Hal ini menunjukkan lemahnya ikatan antara partai dan pengikutnya. Kedua, tumbuhnya "partai mengambang," bahkan efektivitas parpol cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituennya. Ini pula yang turut mengkonfirmasi berbagai penafsiran bahwa institusionalisasi parpol di Indonesia paskareformasi masih lemah.



Seyogianya, diperlukan upaya serius untuk membangun kesadaran bersama, utamanya para pemimpin partai pada era reformasi untuk membenahi diri. Secara tegas dapat dikatakan, para politisi dan elite partai tidak boleh terkesan berupaya untuk melestarikan problematika struktural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan/atau kelompoknya semata.

DAFTAR PUSTAKA

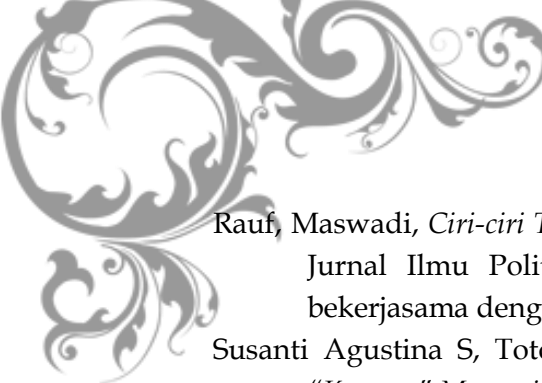
Buku

- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik)*. Bandung: Pustaka Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia
- Ellwin, Warsito dan Hari Subagyo. 2011. *Konstituen Pilar Utama Partai Politik*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ma'shum, Saifullah. 2012. *DPR Terhormat DPR Dihujat: Refleksi Lima Tahun di DPR Periode 2004-2009 (Catatan Sejarah Sang Wakil Rakyat)*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Paska-Orde Baru*, Jakarta: Kencana
- Nazir, M., 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor, Firman. 2015. *Quo Vadis Demokrasi Kita? Sebuah Respon Terhadap Konsolidasi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: RMBooks
- Romli, Lili, 2017. *Problematisasi Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi*. Jakarta: LIPI
- Salang, Sebastian. 2007. *Potret Partai Politik di Indonesia: Asesmen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Wibowo, Pramono Anung. 2013. *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: Kompas



Sumber Lain (Jurnal, Koran, Dokumen, dan Sumber Online)

- Antonio Pradjasto, *Partai Politik, tak Hanya Kemampuan Memerintah*, dalam Jentera, Aturan Main Politik, Edisi 16, April-Juni 2007.
- Ahmad Faiz, *Survei: DPR dan Partai Tidak Dipercaya Publik*, dalam Koran Tempo, 15 Agustus 2016.
- , *Survei: Partai Politik Semakin Tak Dipercaya*, dalam Koran Tempo, 23 Maret 2017.
- Indra J. Pilliang, *Opini: Kebangkitan “Partyocracy”* dalam Koran Jakarta, 27 September 2014.



Rauf, Maswadi, *Ciri-ciri Teori Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 9, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Susanti Agustina S, Toto Suryaningtyas, dan Litbang Kompas, *Jajak Pendapat "Kompas" Mencari Penanda Jabatan Wakil Rakyat*, 31 Juli 2017.

Dokumen CSIS: (Opini) Eep Saefulloh Fatah, *Gejala Partai Mengambang*, dalam *Kompas*, 18 November 2006.

Dokumen Skala Survei Indonesia: *Hasil Nasional tentang Kinerja Partai Politik dan Anggota Legislatif*, Oktober 2012.

http://www.inews.id/multimedia/read/90-persen-peserta-pilkada-berpotensi-jadi-tersangka?sub_slug=video, (diakses tanggal 06 Maret 2018).

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/08/omgr7y280-survei-tii-dpr-lembaga-terkorup>, (diakses tanggal 06 Maret 2018).

TENTANG PENULIS

Efriza, adalah dosen tetap ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) dan dosen tidak tetap di Universitas Bung Karno (UBK) dan di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Sarjana strata 1 ditempuh di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) dan magister strata 2 ditempuh di Universitas Nasional dengan konsentrasi ilmu politik. Aktif menulis buku, salah satunya *Handbook Sistem Politik Indonesia* (2017).

